

ABSTRAK

Asas proporsionalitas yang disamakan dengan asas keseimbangan di mana memberikan makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). Apalagi dalam sebuah hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang asas proporsionalitas dalam kontrak justru dimulai dari aspek filosofis keadilan dalam berkontrak. Namun pertanyaan seputar apa itu keadilan adalah sebuah pertanyaan yang acap kita dengar namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak terlebih apabila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang demikian kompleks.

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah penerapan asas proporsionalitas dalam akta perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Notaris, 2. Bagaimana kendala-kendala dan solusinya dalam penerapan asas proporsionalitas dalam akta perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Notaris, dan 3. Bagaimana akibat hukum penerapan asas proporsionalitas dalam akta perjanjian kerja sama yang dibuat oleh notaris

Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada penguraian serta penafsiran data yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum atau doktrin-doktrin yang dianut dan dijadikan pedoman untuk diterapkan pada suatu kasus sehingga penyajiannya berpangkal pada asas-asas dan teori-teori dan doktrin serta perundang-undangan yang berlaku

Hasil penelitian ini adalah bahwa Peranan Notaris untuk mengimplementasikan asas proporsionalitas dalam perjanjian Akta Kerja sama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek yang dituangkan dalam akta ini akan menemui hambatan-hambatan baik dari pihak Apoteker Pengelola Apotek maupun Pemilik Sarana Apotek sendiri, bahwa asas proporsionalitas ini tidak dapat diwujudkan dan ditafsirkan secara numerik dan matematis sehingga merupakan hambatan bagi Notaris untuk dapat menyeimbangkan antara hak-hak dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban para pihak atau menyeimbangkan hak di satu pihak sementara di pihak lain merupakan kewajiban. Implementasi asas proporsionalitas dalam Akta Kerja sama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek maka akan mempunyai akibat hukum baik oleh kedua belah pihak

Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Notaris, akta Perjanjian Kerja Sama

ABSTRACT

The principle of proportionality is equated with the principle of balance which gives meaning to the principle of balance as the balance of the position of the parties to the contract. Therefore, in the event of imbalances that interfere with the content of the contract required the intervention of certain authorities (government). Especially in a contractual relationship of the parties essentially can not be released in conjunction with the issue of justice. Contract as a forum that brings together the interests of one party to the other party demanding a fair form of exchange of interests. Therefore, it is appropriate and essential if the analysis of the principle of proportionality in the contract begins with a philosophical aspects of justice in the contract.

The problem is formulated in this study were 1. How does the application of the principle of proportionality in the deed of agreement Notary, 2. How constraints and solutions in the application of the principle of proportionality in the deed of agreement Notary, and 3. How result legal application of the principle of proportionality in the deed of agreement made by the notary.

Approach to the problem is the method of normative juridical approach that emphasizes the decomposition and interpretation of data associated with legal norms or doctrines adopted and used as guidelines to be applied to a case that the presentation stems from the principles and theories and doctrines as well as the applicable legislation.

The results of this study is that the role of the Notary to implement the principle of proportionality in the agreement Deed of Cooperation between Pharmacist business Pharmacy with Own Means Pharmacy outlined in this deed will encounter obstacles from both Pharmacist business Pharmacy and owner Means pharmacy itself, that the principle of proportionality this can not be realized and interpret numerical and mathematical thus an obstacle to the Notary to be able to strike a balance between the rights compared with the obligations of the parties or balancing the rights on the one hand while on the other hand is an obligation. Implementation of the principle of proportionality in the Deed of Cooperation between Pharmacy Pharmacist business with Own Means Pharmacy it will be a legal effect either by both parties

Keywords: Principle of Proportionality, notary, deed Cooperation Agreement